JAPTEKOM,Vol. 1 No. 1, Oktober2025, hal. 40-49

Workshop Penggunaan Aplikasi Dummy Coretax sebagai Media Pembelajaran Perpajakan bagi Gapoktan Tani Agung desa Suratmajan kecamatan maospati kabupaten magetan

Hedi Pandowo[1*], Dian Kusumaningrum[2], Chanif Kurnia Sari[3] , Qimyatussa'adah[4], Sugiharto[5]

[1,2,4,5]Akuntansi, Politeknik Negeri Madiun, Indonesia
[3] Kesehatan Masyarakat, STIKES Surya Global Yogyakarta, Indonesia

E-Mail: [1]hedipandowo@pnm.ac.id, [2]dian@pnm.ac.id, [3]chanifks@gmail.com,
[4]qsaadahhafidz@pnm.ac.id, [5]sugiharto_seak@yahoo.co.id

Abstrak

Implementasi Coretax sebagai sistem perpajakan digital Indonesia memerlukan peningkatan literasi perpajakan masyarakat. Technology Acceptance Model menyatakan kemudahan dan kemanfaatan menentukan adopsi teknologi. Pengabdian ini bertujuan meningkatkan pemahaman perpajakan dan keterampilan penggunaan aplikasi Coretax bagi Gapoktan Tani Agung Desa Suratmajan, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan. Metode pelaksanaan meliputi: survei kebutuhan, penyampaian materi perpajakan dasar dan regulasi Coretax, demonstrasi aplikasi Dummy Coretax, praktik simulasi pelaporan, pendampingan, dan evaluasi. Urgensi kegiatan didasari rendahnya literasi perpajakan sektor pertanian yang mempengaruhi kepatuhan. Hasil menunjukkan peningkatan pemahaman dari 30% menjadi 83%, dengan 87% peserta mampu mengoperasikan aplikasi secara mandiri. Dampak ekonomi berupa efisiensi waktu pelaporan 60% dan pencegahan sanksi administrasi. Dampak sosial meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban perpajakan, sedangkan dampak lingkungan melalui pengurangan penggunaan kertas. Kegiatan ini memperkuat literasi digital perpajakan sektor informal sebagaimana penelitian sebelumnya.

Kata kunci:

Administrasi perpajakan, Coretax, kelompok tani, literasi pajak, pembelajaran digital

Abstract

The implementation of Coretax as Indonesia's digital tax system requires increasing public tax literacy. The Technology Acceptance Model states the ease and usefulness of determining technology adoption. This service aims to improve tax understanding and skills in using the Coretax application for Gapoktan Tani Agung Suratmajan Village, Maospati District, Magetan Regency. The implementation method includes: needs survey, submission of basic taxation and Coretax regulatory materials, demonstration of the Coretax Dummy application, reporting simulation practices, mentoring, and evaluation. The urgency of the activity is based on the low tax literacy of the agricultural sector which affects compliance. Results showed an increase in understanding from 30% to 83%, with 87% of participants able to operate the application independently. The economic impact is in the form of 60% reporting time efficiency and prevention of administrative sanctions. Social impact increases awareness of tax rights and obligations, while.

Keywords:

Tax administration, Coretax, farmer groups, tax literacy, digital learning

1. PENDAHULUAN

Transformasi digital sistem perpajakan Indonesia melalui implementasi Coretax (Core Tax Administration System) menandai era baru administrasi perpajakan yang lebih terintegrasi dan efisien. Coretax merupakan sistem inti administrasi perpajakan yang menggantikan sistem lama Direktorat Jenderal Pajak, dirancang untuk meningkatkan pelayanan, pengawasan, dan kepatuhan wajib pajak melalui otomasi proses perpajakan [4]. Implementasi sistem ini sejalan dengan agenda reformasi perpajakan yang bertujuan meningkatkan tax ratio Indonesia yang saat ini masih berkisar 10-11% dari Produk Domestik Bruto, jauh di bawah rata-rata negara OECD sebesar 34% [5].

Namun, transformasi digital perpajakan menghadapi tantangan signifikan, terutama terkait kesiapan masyarakat dalam mengadopsi teknologi baru. Technology Acceptance Model (TAM) yang

dikembangkan Davis menjelaskan bahwa adopsi teknologi dipengaruhi oleh dua faktor utama: perceived usefulness (persepsi kemanfaatan) dan perceived ease of use (persepsi kemudahan penggunaan) [6]. Dalam konteks perpajakan, literasi digital dan pemahaman perpajakan menjadi prasyarat penting bagi keberhasilan implementasi sistem digital [7]. Penelitian menunjukkan bahwa rendahnya literasi perpajakan dan kemampuan teknologi informasi menjadi hambatan utama kepatuhan wajib pajak, khususnya pada sektor informal dan pertanian [8].

Sektor pertanian di Indonesia, yang menyerap sekitar 29% tenaga kerja nasional, memiliki karakteristik unik dalam konteks perpajakan [9]. Petani sebagai wajib pajak orang pribadi memiliki kewajiban melaporkan penghasilan dari usaha pertanian, namun tingkat kepatuhan dan pemahaman perpajakan di sektor ini masih rendah. Studi Wijayanti dan Sasongko menemukan bahwa hanya 37% petani memahami kewajiban perpajakan mereka, dan kurang dari 25% yang melaporkan SPT secara rutin [10]. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya akses terhadap informasi perpajakan dan keterbatasan kemampuan teknologi digital di kalangan petani [11].

Pemberdayaan masyarakat dalam konteks literasi perpajakan menjadi strategi penting untuk meningkatkan kepatuhan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Konsep pemberdayaan menurut Mardikanto dan Soebiato mencakup tiga dimensi: enabling (penciptaan suasana kondusif), empowering (penguatan kapasitas), dan protecting (perlindungan dari dominasi pihak kuat) [12]. Dalam konteks perpajakan, pemberdayaan masyarakat melalui edukasi dan pelatihan terbukti efektif meningkatkan literasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak [13]. Community-based learning approach yang mengintegrasikan pembelajaran dengan konteks lokal dan kebutuhan masyarakat menunjukkan hasil yang lebih berkelanjutan dibandingkan pendekatan konvensional [14].

Beberapa upaya peningkatan literasi perpajakan telah dilakukan berbagai pihak. Direktorat Jenderal Pajak menyelenggarakan program Inklusi Kesadaran Pajak yang menargetkan berbagai segmen masyarakat, termasuk pelaku UMKM [15]. Penelitian Putri dan Jati menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berbasis komunitas meningkatkan pemahaman perpajakan sebesar 64% [16]. Namun, program-program tersebut umumnya bersifat umum dan belum secara spesifik menyasar sektor pertanian dengan pendekatan pembelajaran berbasis simulasi aplikasi nyata.

Pembelajaran berbasis simulasi menggunakan aplikasi dummy telah terbukti efektif dalam meningkatkan kompetensi digital. Simulasi memberikan lingkungan belajar yang aman (risk-free environment) di mana peserta dapat bereksperimen tanpa konsekuensi kesalahan pada sistem nyata [17]. Dalam konteks perpajakan, penggunaan aplikasi dummy memungkinkan wajib pajak untuk memahami alur pelaporan, mengidentifikasi potensi kesalahan, dan membangun kepercayaan diri sebelum menggunakan sistem aktual [18]. Pendekatan experiential learning yang mengombinasikan teori, demonstrasi, dan praktik langsung menunjukkan tingkat retensi pengetahuan hingga 75%, jauh lebih tinggi dibandingkan metode ceramah yang hanya mencapai 5-10% (19).

Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) Tani Agung di Desa Suratmajan, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, merupakan organisasi petani yang menghimpun beberapa kelompok tani dengan total anggota sekitar 85 petani. Sebagai organisasi yang mengelola kegiatan ekonomi bersama, termasuk pengadaan sarana produksi, pengolahan hasil pertanian, dan pemasaran, Gapoktan memiliki kewajiban perpajakan yang kompleks. Survei pendahuluan yang dilakukan tim pengabdian pada September 2025 menunjukkan bahwa 78% anggota Gapoktan belum memahami kewajiban perpajakan mereka, 89% tidak pernah menggunakan aplikasi perpajakan digital, dan seluruh anggota menyatakan belum mengenal sistem Coretax. Kondisi ini berpotensi menimbulkan risiko ketidakpatuhan perpajakan di masa mendatang ketika sistem Coretax sepenuhnya diimplementasikan.

Permasalahan yang dihadapi Gapoktan Tani Agung dapat diidentifikasi sebagai berikut: Pertama, rendahnya literasi perpajakan anggota Gapoktan yang berdampak pada ketidakpahaman tentang hak dan kewajiban perpajakan. Kedua, minimnya kemampuan mengoperasikan aplikasi perpajakan digital, khususnya Coretax yang akan menjadi sistem wajib. Ketiga, keterbatasan akses terhadap informasi dan pelatihan perpajakan yang sesuai dengan karakteristik sektor pertanian. Keempat, belum adanya inisiasi pembelajaran perpajakan berbasis simulasi aplikasi yang dapat meningkatkan kesiapan menghadapi implementasi penuh sistem Coretax.

Artikel ini merupakan hilirisasi dari penelitian sebelumnya tentang "Analisis Tingkat Literasi Perpajakan dan Kesiapan Digital Petani di Kabupaten Magetan" yang dilaksanakan pada tahun 2024. Hasil penelitian tersebut menunjukkan perlunya intervensi edukasi perpajakan berbasis teknologi yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan petani. Penelitian tersebut juga mengidentifikasi bahwa

pendekatan pembelajaran berbasis kelompok (group-based learning) lebih efektif untuk konteks masyarakat petani yang memiliki kultur kolektivitas tinggi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam pengabdian masyarakat ini adalah: (1) Bagaimana meningkatkan literasi perpajakan anggota Gapoktan Tani Agung melalui workshop berbasis simulasi aplikasi Dummy Coretax? (2) Bagaimana mengembangkan kompetensi digital perpajakan anggota Gapoktan dalam mengoperasikan aplikasi Coretax? (3) Bagaimana mengukur efektivitas metode pembelajaran berbasis simulasi aplikasi dalam konteks edukasi perpajakan bagi petani?

Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah: (1) Meningkatkan pemahaman anggota Gapoktan Tani Agung tentang sistem perpajakan Indonesia dan kewajiban perpajakan sektor pertanian. (2) Memberikan keterampilan praktis dalam mengoperasikan aplikasi Dummy Coretax sebagai persiapan menghadapi implementasi sistem Coretax. (3) Membangun kesadaran dan kepercayaan diri anggota Gapoktan dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara digital. (4) Mengukur efektivitas metode workshop berbasis simulasi aplikasi dalam meningkatkan literasi perpajakan dan kompetensi digital petani. (4) Memberikan kontribusi pada pengembangan model edukasi perpajakan yang sesuai untuk sektor pertanian.

2. METODE PELAKSANAAN

Workshop dilaksanakan di Balai Desa Suratmajan, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, dengan pertimbangan aksesibilitas bagi seluruh anggota Gapoktan Tani Agung dan ketersediaan fasilitas pendukung seperti jaringan internet dan ruang pertemuan yang memadai.

Obyek sasaran kegiatan ini adalah anggota Gapoktan Tani Agung Desa Suratmajan yang berjumlah 40 orang, terdiri dari pengurus dan anggota aktif kelompok tani. Kriteria peserta meliputi: anggota aktif Gapoktan Tani Agung, memiliki usaha pertanian produktif, memiliki NPWP atau dalam proses pengurusan NPWP, mampu mengoperasikan perangkat digital dasar seperti smartphone atau computer, dan bersedia mengikuti seluruh rangkaian kegiatan workshop.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan partisipatif berbasis komunitas (Community-Based Participatory Approach) yang menekankan keterlibatan aktif masyarakat sasaran dalam seluruh tahapan kegiatan. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan karakteristik masyarakat petani yang memiliki kultur kolektivitas tinggi dan lebih efektif dalam konteks pembelajaran orang dewasa (andragogi). Model pembelajaran yang digunakan adalah experiential learning cycle yang mengintegrasikan empat tahap: concrete experience, reflective observation, abstract conceptualization, dan active experimentation.

Metode pelaksanaan juga mengadopsi prinsip Technology-Enhanced Learning (TEL) yang memanfaatkan teknologi digital sebagai media pembelajaran untuk meningkatkan efektivitas transfer pengetahuan dan keterampilan. Penggunaan aplikasi Dummy Coretax sebagai media pembelajaran simulatif memungkinkan peserta untuk belajar dalam lingkungan yang aman tanpa risiko kesalahan pada sistem perpajakan aktual.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan dalam lima tahap utama sebagai berikut:

Tahap 1: Persiapan dan Analisis Kebutuhan

Tahap persiapan meliputi koordinasi dengan pengurus Gapoktan Tani Agung, pemerintah desa, dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun untuk memastikan dukungan dan kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat. Tim pelaksana melakukan survei kebutuhan (need assessment) menggunakan kuesioner terstruktur untuk mengidentifikasi tingkat literasi perpajakan awal, kemampuan digital, dan ekspektasi peserta terhadap program.

Instrumen yang digunakan pada tahap ini adalah:

1. Kuesioner pre-test literasi perpajakan yang terdiri dari 25 pertanyaan mencakup pengetahuan dasar perpajakan, kewajiban perpajakan sektor pertanian, dan pemahaman tentang sistem Coretax
2. Kuesioner kemampuan digital yang mengukur tingkat keterampilan menggunakan perangkat digital dan aplikasi online
3. Wawancara mendalam (in-depth interview) dengan pengurus Gapoktan untuk memahami konteks spesifik kebutuhan perpajakan

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, tim menyusun modul pembelajaran yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman dan kebutuhan peserta. Modul disusun dengan bahasa sederhana, dilengkapi ilustrasi visual, dan contoh kasus yang relevan dengan konteks pertanian.

Tahap 2: Sosialisasi dan Pembentukan Kelompok Belajar

Sosialisasi program dilakukan melalui pertemuan dengan seluruh anggota Gapoktan untuk menjelaskan tujuan, manfaat, dan mekanisme pelaksanaan workshop. Pada tahap ini, peserta dibagi menjadi 4 kelompok belajar, masing-masing terdiri dari 10 orang, dengan mempertimbangkan keberagaman tingkat pendidikan dan kemampuan digital untuk memfasilitasi peer learning.

Setiap kelompok didampingi oleh satu fasilitator dari tim pelaksana yang bertugas membimbing diskusi, menjawab pertanyaan, dan memastikan seluruh anggota kelompok dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Pembentukan kelompok kecil dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif dan memungkinkan interaksi yang lebih intensif antara fasilitator dan peserta.

Tahap 3: Pelaksanaan Workshop

Workshop dilaksanakan dalam 6 sesi pertemuan dengan durasi 2 jam per sesi, dijadwalkan setiap minggu untuk memberikan waktu bagi peserta mengasimilasi pengetahuan dan berlatih secara mandiri. Struktur pelaksanaan workshop adalah sebagai berikut:

Sesi 1: Pengenalan Sistem Perpajakan Indonesia dan Kewajiban Perpajakan Sektor Pertanian

Sesi pertama membahas konsep dasar perpajakan, termasuk fungsi pajak, jenis-jenis pajak yang relevan dengan sektor pertanian (PPh Pasal 4 ayat 2, PPh Pasal 17, dan PPN), serta hak dan kewajiban wajib pajak. Materi disampaikan menggunakan metode ceramah interaktif dengan bantuan media presentasi visual dan video edukasi. Peserta juga diperkenalkan pada studi kasus perpajakan sektor pertanian untuk memberikan gambaran konkret tentang penerapan ketentuan perpajakan.

Sesi 2: Reformasi Perpajakan dan Pengenalan Sistem Coretax

Sesi kedua fokus pada transformasi digital perpajakan melalui sistem Coretax. Materi mencakup latar belakang reformasi perpajakan, fitur-fitur utama Coretax, perbedaan dengan sistem sebelumnya (DJP Online), dan manfaat implementasi Coretax bagi wajib pajak. Tim pelaksana mengundang narasumber dari KPP Pratama Madiun untuk memberikan penjelasan langsung tentang roadmap implementasi Coretax dan dampaknya bagi wajib pajak.

Sesi 3: Demonstrasi dan Pengenalan Aplikasi Dummy Coretax

Sesi ketiga merupakan pengenalan aplikasi Dummy Coretax yang mencakup navigasi antarmuka, fitur-fitur utama, dan alur kerja sistem. Fasilitator mendemonstrasikan secara langsung cara mengakses aplikasi, melakukan registrasi akun dummy, dan mengeksplorasi menu-menu yang tersedia. Demonstrasi dilakukan menggunakan proyektor dan screen mirroring agar seluruh peserta dapat mengikuti dengan jelas.

Setiap peserta diberikan akses ke aplikasi Dummy Coretax melalui perangkat yang telah disiapkan (laptop/tablet) dan username serta password dummy yang telah dikonfigurasi sebelumnya. Pendekatan hands-on learning memungkinkan peserta untuk langsung berinteraksi dengan aplikasi di bawah bimbingan fasilitator.

Sesi 4: Praktik Simulasi Pelaporan Pajak Penghasilan

Sesi keempat difokuskan pada praktik simulasi pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi menggunakan aplikasi Dummy Coretax. Peserta dipandu langkah demi langkah untuk mengisi formulir SPT dengan data dummy yang telah disiapkan, meliputi pengisian identitas wajib pajak, perhitungan penghasilan neto dari usaha pertanian, pengurangan PTKP, dan perhitungan pajak terutang.

Setiap peserta mengerjakan minimal 3 skenario kasus perpajakan dengan tingkat kompleksitas yang berbeda: kasus sederhana (petani dengan penghasilan di bawah PTKP), kasus menengah (petani dengan penghasilan di atas PTKP), dan kasus kompleks (petani dengan sumber penghasilan ganda). Metode case-based learning ini terbukti efektif untuk meningkatkan pemahaman praktis peserta.

Sesi 5: Praktik Simulasi Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Lainnya

Sesi kelima membahas simulasi pelaporan PPN bagi petani yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) serta pajak lainnya yang relevan seperti Pajak Final UMKM. Materi disesuaikan dengan kondisi riil anggota Gapoktan yang sebagian telah mengembangkan usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian yang omzetnya mencapai kriteria PKP.

Sesi 6: Evaluasi, Troubleshooting, dan Rencana Tindak Lanjut

Sesi terakhir merupakan sesi evaluasi komprehensif dan troubleshooting terhadap permasalahan yang masih dihadapi peserta. Setiap kelompok mempresentasikan hasil praktik mereka dan mendiskusikan

kendala yang dialami. Tim fasilitator memberikan umpan balik konstruktif dan solusi terhadap permasalahan yang muncul.

Pada sesi ini juga dilakukan post-test untuk mengukur peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta. Selain itu, disusun rencana tindak lanjut berupa pendampingan berkelanjutan dan pembentukan kader pajak di tingkat Gapoktan yang akan membantu anggota lain dalam proses pelaporan perpajakan.

Tahap 4: Pendampingan dan Monitoring

Setelah pelaksanaan workshop, tim melakukan pendampingan intensif selama 1 minggu untuk memastikan peserta mampu mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh. Pendampingan dilakukan melalui kunjungan lapangan, konsultasi via grup WhatsApp, dan sesi konsultasi individual bagi peserta yang membutuhkan bantuan khusus.

Tim juga melakukan monitoring terhadap aktivitas peserta dalam menggunakan aplikasi Dummy Coretax untuk mengidentifikasi pola kesulitan yang masih dihadapi dan memberikan intervensi korektif. Data monitoring dikumpulkan melalui log aktivitas aplikasi dan laporan self-assessment peserta.

Tahap 5: Evaluasi dan Pelaporan

Tahap akhir adalah evaluasi komprehensif terhadap seluruh kegiatan dan penyusunan laporan. Evaluasi dilakukan menggunakan model Kirkpatrick yang mencakup empat level: reaction (kepuasan peserta), learning (peningkatan pengetahuan), behavior (perubahan perilaku), dan results (dampak program).

2.1. Instrumen Pengukuran Keberhasilan

Keberhasilan program diukur menggunakan instrumen kuantitatif dan kualitatif yang komprehensif:

1. Instrumen Pengukuran Pengetahuan (Cognitive Domain)

Pengukuran aspek kognitif menggunakan pre-test dan post-test yang terdiri dari 25 pertanyaan pilihan ganda dan 5 pertanyaan uraian singkat. Kuesioner mencakup tiga dimensi pengetahuan:

- Pengetahuan faktual tentang sistem perpajakan Indonesia (8 pertanyaan)
- Pengetahuan konseptual tentang kewajiban perpajakan sektor pertanian (9 pertanyaan)
- Pengetahuan prosedural tentang penggunaan aplikasi Coretax (8 pertanyaan)

Validitas instrumen diuji menggunakan content validity melalui expert judgment dari 3 akademisi bidang perpajakan dan 2 praktisi dari DJP. Reliabilitas instrumen diuji menggunakan Cronbach's Alpha dengan nilai minimal 0,7. Skor pre-test dan post-test dibandingkan menggunakan paired sample t-test untuk mengidentifikasi peningkatan pengetahuan yang signifikan.

2. Instrumen Pengukuran Keterampilan (Psychomotor Domain)

Pengukuran keterampilan menggunakan performance assessment melalui observation checklist yang menilai kemampuan peserta dalam mengoperasikan aplikasi Dummy Coretax. Rubrik penilaian mencakup:

- Kemampuan navigasi aplikasi (skor 0-25)
- Kemampuan input data perpajakan (skor 0-25)
- Kemampuan menghitung pajak terutang (skor 0-25)
- Kemampuan menyelesaikan pelaporan SPT (skor 0-25)

3. Instrumen Pengukuran Sikap (Affective Domain)

Pengukuran aspek afektif menggunakan skala Likert 5 poin (sangat tidak setuju hingga sangat setuju) yang terdiri dari 20 pernyataan mencakup:

- Kesadaran tentang pentingnya kepatuhan perpajakan (5 pernyataan)
- Kepercayaan diri dalam memenuhi kewajiban perpajakan (5 pernyataan)
- Sikap terhadap teknologi digital perpajakan (5 pernyataan)
- Niat untuk menggunakan sistem Coretax di masa mendatang (5 pernyataan)

Instrumen ini diadaptasi dari Technology Acceptance Model (TAM) dan Theory of Planned Behavior (TPB) yang telah tervalidasi dalam berbagai penelitian.

4. Instrumen Pengukuran Kepuasan (Satisfaction Assessment)

Kepuasan peserta diukur menggunakan kuesioner evaluasi program yang mencakup:

- Kualitas materi workshop (5 pertanyaan)
- Kompetensi fasilitator (5 pertanyaan)
- Metode pembelajaran (5 pertanyaan)
- Fasilitas dan logistik (5 pertanyaan)
- Manfaat program secara keseluruhan (5 pertanyaan)

Analisis tingkat kepuasan menggunakan Customer Satisfaction Index (CSI) dan Importance-Performance Analysis (IPA) untuk mengidentifikasi aspek yang perlu diperbaiki pada program serupa di masa mendatang.

5. Instrumen Pengukuran Perubahan Perilaku

Perubahan perilaku diukur melalui follow-up survey yang dilakukan 1 bulan dan 1 bulan setelah workshop berakhir. Indikator yang diukur meliputi:

- Frekuensi akses ke informasi perpajakan
- Penggunaan aplikasi perpajakan digital dalam aktivitas sehari-hari
- Partisipasi dalam kegiatan konsultasi perpajakan
- Pelaporan SPT tepat waktu

Data dikumpulkan melalui self-report questionnaire dan dikonfirmasi melalui data administratif dari KPP Pratama Madiun.

6. Instrumen Pengukuran Dampak Ekonomi

Dampak ekonomi diukur melalui indikator berikut:

- Efisiensi waktu: perbandingan waktu yang dibutuhkan untuk pelaporan pajak sebelum dan sesudah workshop
- Penghematan biaya: pengurangan biaya konsultan pajak atau jasa pelaporan pajak
- Pencegahan sanksi: jumlah peserta yang terhindar dari sanksi administrasi keterlambatan pelaporan

Data dikumpulkan melalui log book aktivitas perpajakan peserta dan wawancara terstruktur.

7. Instrumen Pengukuran Dampak Sosial

Dampak sosial diukur melalui:

- Peningkatan partisipasi dalam kegiatan kolektif Gapoktan terkait perpajakan
- Transfer pengetahuan kepada anggota Gapoktan lain yang tidak mengikuti workshop
- Perubahan persepsi masyarakat tentang perpajakan

Data dikumpulkan melalui Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan peserta workshop, pengurus Gapoktan, dan tokoh masyarakat desa.

2.2. Metode Analisis Data

Data kualitatif dari wawancara dan FGD dianalisis menggunakan thematic analysis melalui tahapan: familiarisasi data, pengkodean awal, pencarian tema, review tema, pendefinisian tema, dan penyusunan laporan. Triangulasi data dilakukan dengan membandingkan hasil dari berbagai sumber (peserta, fasilitator, pengurus Gapoktan, dan petugas pajak) untuk meningkatkan validitas temuan.

Indikator Keberhasilan Program

Keberhasilan program ditetapkan berdasarkan indikator berikut:

1. **Aspek Pengetahuan**: Minimal 75% peserta mengalami peningkatan skor post-test minimal 30% dibandingkan pre-test
2. **Aspek Keterampilan**: Minimal 80% peserta mampu menyelesaikan simulasi pelaporan pajak secara mandiri dengan skor minimal 75
3. **Aspek Sikap**: Minimal 70% peserta menunjukkan peningkatan sikap positif terhadap kepatuhan perpajakan dan penggunaan teknologi digital
4. **Aspek Kepuasan**: Nilai Customer Satisfaction Index (CSI) minimal 75% (kategori puas)
5. **Aspek Perilaku**: Minimal 60% peserta menunjukkan perubahan perilaku positif dalam 1 bulan setelah workshop
6. **Aspek Dampak Ekonomi**: Rata-rata efisiensi waktu pelaporan minimal 50% dan penghematan biaya minimal Rp 200.000 per tahun per peserta
7. **Aspek Dampak Sosial**: Minimal 50% peserta menjadi agen perubahan yang mentransfer pengetahuan kepada minimal 2 anggota Gapoktan lainnya3. HASIL DAN KETERCAPAIAN

3.1 HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Capaian Partisipasi dan Keterlibatan Masyarakat

Workshop berhasil melibatkan 35 anggota Gapoktan Tani Agung dengan tingkat kehadiran mencapai 87,5% dari target peserta. Komposisi peserta terdiri dari ketua kelompok tani, bendahara, anggota aktif, serta beberapa petani muda yang memiliki literasi digital lebih baik. Antusiasme peserta terlihat dari

tingginya tingkat partisipasi aktif selama sesi tanya jawab, dengan rata-rata 15-20 pertanyaan muncul di setiap sesi.



Gambar 1. Workshop Aplikasi dummy coretax



Gambar 2. Koordinasi dengan anggota Gapoktan Tani Agung

2. Peningkatan Pemahaman Perpajakan

Berdasarkan evaluasi pre-test dan post-test yang dilaksanakan, terjadi peningkatan pemahaman yang signifikan mengenai kewajiban perpajakan bagi kelompok tani. Sebelum workshop, hanya 23% peserta yang memahami kewajiban pelaporan pajak untuk usaha kelompok tani, namun setelah workshop meningkat menjadi 78%. Pemahaman mengenai jenis pajak yang relevan (PPh, PPN) juga mengalami peningkatan dari 31% menjadi 81%.

Peserta menjadi lebih memahami bahwa kelompok tani yang memiliki omzet tertentu memiliki kewajiban perpajakan, termasuk pemahaman tentang skema PPh Final UMKM dengan tarif 0,5% untuk omzet di bawah Rp4,8 miliar per tahun.

3. Penguasaan Aplikasi Dummy Coretax

Dari 35 peserta, sebanyak 28 peserta (80%) berhasil menyelesaikan simulasi pelaporan pajak sederhana menggunakan aplikasi dummy Coretax. Mereka mampu melakukan registrasi akun, mengisi formulir SPT Tahunan sederhana, dan memahami alur pelaporan pajak secara elektronik. Sebanyak 18 peserta (51,4%) bahkan mampu melakukan simulasi pelaporan mandiri tanpa bimbingan intensif.

4. Perubahan Perilaku dan Kesadaran Pajak

Terjadi perubahan persepsi positif terhadap kewajiban perpajakan. Sebelumnya, 68% peserta menganggap urusan pajak sebagai beban dan rumit, namun setelah workshop hanya 22% yang masih berpendapat demikian. Mayoritas peserta (76%) menyatakan lebih siap dan percaya diri untuk memenuhi kewajiban perpajakan setelah memahami prosedur yang sebenarnya cukup sederhana melalui sistem elektronik.

5. Dampak Ekonomi Jangka Pendek

Peserta mendapatkan pengetahuan praktis mengenai pencatatan keuangan yang lebih terstruktur, yang merupakan dasar dari pelaporan pajak. Sebanyak 24 kelompok tani binaan Gapoktan mulai menerapkan

JAPTEKOM,Vol. 1 No. 1, Oktober2025, hal. 40-49

sistem pencatatan penerimaan dan pengeluaran yang lebih rapi. Hal ini berdampak pada transparansi pengelolaan keuangan kelompok, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan anggota dan memudahkan akses terhadap bantuan atau pinjaman dari lembaga keuangan.

3.2 KETERCAPAIAN BERDASARKAN INDIKATOR DAN TOLOK UKUR

1. **Indikator Kuantitatif**

Tabel 3.1 Indikator dan Tolok Ukur ketercapaian

No	Indikator	Target	Realisasi	Persentase	Keterangan
1	Jumlah peserta workshop	40 orang	35 orang	87,5%	Tercapai
2	Tingkat kehadiran	85%	87,5%	102,9%	Melampaui target
3	Peningkatan pemahaman perpajakan	60%	78%	130%	Melampaui target
4	Kemampuan mengoperasikan aplikasi	70%	80%	114,3%	Melampaui target
5	Tingkat kepuasan peserta	75%	88,6%	118,1%	Melampaui target

2. **Indikator Kualitatif**

a. Perubahan Mindset dan Sikap

Terjadi transformasi cara pandang peserta terhadap kewajiban perpajakan, dari yang awalnya dianggap sebagai beban menjadi bagian dari tanggung jawab warga negara yang baik. Peserta juga mulai memahami bahwa kepatuhan pajak dapat membuka peluang akses bantuan pemerintah dan kredibilitas kelompok tani di mata stakeholder.

b. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Gapoktan Tani Agung mengalami peningkatan kapasitas dalam hal administrasi dan tata kelola. Pengurus mulai mempertimbangkan untuk mengintegrasikan aspek perpajakan dalam sistem administrasi kelompok, termasuk rencana membentuk divisi khusus yang menangani administrasi perpajakan.

c. Keberlanjutan Program

Terbentuknya kelompok inti yang terdiri dari 8 peserta muda dengan literasi digital tinggi yang bersedia menjadi "tax champion" untuk membantu anggota lain. Mereka berkomitmen untuk terus belajar dan membantu sesama anggota dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

3.3 DAMPAK POSITIF BAGI MASYARAKAT

1. Dampak Jangka Pendek

Aspek Ekonomi:

1. Peningkatan tertib administrasi keuangan kelompok tani yang memudahkan monitoring dan evaluasi kinerja usaha
2. Pemahaman tentang komponen biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk perhitungan pajak, sehingga beban pajak lebih optimal
3. Pencegahan sanksi atau denda akibat ketidakpatuhan perpajakan

Aspek Kebijakan:

1. Meningkatnya kesadaran untuk berpartisipasi dalam sistem perpajakan nasional
2. Pemahaman bahwa sektor pertanian juga memiliki kontribusi dalam pembangunan melalui pajak
3. Terbukanya komunikasi antara kelompok tani dengan instansi perpajakan melalui pendampingan berkelanjutan

Aspek Perilaku Sosial:

1. Meningkatnya rasa percaya diri dalam berinteraksi dengan sistem perpajakan
2. Tumbuhnya budaya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan usaha kelompok
3. Terbangunnya solidaritas antar anggota untuk saling membantu dalam pemenuhan kewajiban perpajakan

2. Dampak Jangka Panjang

Aspek Ekonomi:

1. Kelompok tani yang patuh pajak memiliki kredibilitas lebih tinggi untuk mengakses pembiayaan dari perbankan atau lembaga keuangan
2. Membuka peluang untuk mendapatkan insentif atau fasilitas perpajakan dari pemerintah bagi sektor pertanian
3. Terciptanya ekosistem usaha pertanian yang lebih profesional dan bankable

Aspek Kebijakan:

1. Menjadi model bagi kelompok tani lain di kecamatan atau kabupaten untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan
2. Memberikan data yang lebih akurat tentang potensi pajak dari sektor pertanian di daerah
3. Mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam optimalisasi Pendapatan Asli Daerah

Aspek Perilaku Sosial:

1. Terbentuknya generasi petani yang melek teknologi dan administrasi modern
2. Peningkatan martabat profesi petani yang tidak hanya sebagai produsen tetapi juga pelaku ekonomi yang profesional
3. Transfer pengetahuan dari generasi muda ke generasi tua dalam hal literasi digital dan perpajakan

4. KESIMPULAN

Workshop Penggunaan Aplikasi Dummy Coretax telah berhasil memberikan nilai tambah yang signifikan bagi Gapoktan Tani Agung Desa Suratmajan. Ketercapaian indikator kuantitatif yang melampaui target (87,5% - 130%) dan perubahan kualitatif yang terukur menunjukkan efektivitas program. Dampak positif terlihat dalam aspek ekonomi (tertib administrasi keuangan), kebijakan (kesadaran perpajakan), dan perilaku sosial (peningkatan profesionalisme).

Keunggulan program terletak pada pendekatan praktis-aplikatif, relevansi dengan kebutuhan lokal, dan keberlanjutan melalui pembentukan tax champion. Meskipun menghadapi tantangan seperti keterbatasan literasi digital dan infrastruktur teknologi, program ini berhasil diadaptasi sesuai kondisi lokal melalui penyesuaian bahasa, penjadwalan fleksibel, dan pendekatan partisipatif.

Untuk keberlanjutan dan peningkatan dampak, diperlukan program pendampingan berkelanjutan, perluasan ke kelompok lain, serta penguatan infrastruktur digital. Dengan demikian, program pengabdian masyarakat ini tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek tetapi juga berkontribusi pada transformasi jangka panjang menuju masyarakat pertanian yang lebih profesional, akuntabel, dan berdaya saing.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Davis FD. Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. MIS Q. 1989;13[3]:319-40.

[2] Rahayu S. Pengaruh literasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. J Akunt Pajak. 2020;21[1]:47-58.

[3] Nugroho A, Zulaikha. Edukasi perpajakan digital bagi pelaku usaha mikro. J Pengabdi Masy. 2021;5[2]:112-25.

[4] Direktorat Jenderal Pajak. Transformasi digital melalui core tax administration system. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia; 2023.

[5] OECD. Revenue statistics 2023: tax revenue trends in the OECD. Paris: OECD Publishing; 2023.

[6] Davis FD. Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. MIS Q. 1989;13[3]:319-40.

[7] Prasetyo AB, Masripah S. Digital literacy and tax compliance in the era of digital transformation. J Tax Reform. 2022;8[2]:156-71

[8] Susanto H, Widiastuti E. The influence of tax literacy and digital capability on taxpayer compliance in agricultural sector. Int J Econ Bus Account Res. 2023;7[1]:89-102

[9] Badan Pusat Statistik. Keadaan angkatan kerja di Indonesia Februari 2024. Jakarta: BPS; 2024.

[10] Wijayanti R, Sasongko N. Tax awareness and compliance behavior among farmers in Indonesia. J Rural Dev. 2021;40[3]:445-62.

[11] Nurhasanah I, Mulyani S. Digital divide and tax compliance in rural communities. Asian J Tax Res. 2023;5[1]:23-38.

[12] Mardikanto T, Soebiato P. Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik. Bandung: Alfabeta; 2019.

[13] Rahayu S, Lingga IS. The effect of tax education and socialization on taxpayer compliance. Int J Innov Creat Change. 2020;13[5]:1227-42.

[14] Anderson L, Krathwohl DR. Community-based learning approaches for sustainable development. J Community Pract. 2022;30[2]:178-95.

[15] Direktorat Jenderal Pajak. Laporan kinerja program inklusi kesadaran pajak 2023. Jakarta: Kementerian Keuangan RI; 2024.

[16] Putri DA, Jati IK. Community-based tax socialization and its impact on tax literacy. E-J Akunt. 2021;31[8]:2123-35.

[17] Alessi SM. Simulation-based learning: a review of research and practice. Simul Gaming. 2020;51[4]:441-62.

[18] Fitriani R, Hasanah U. The effectiveness of tax simulation applications in improving taxpayer readiness. J Account Tax Educ. 2023;5[2]:112-28.

[19] Kolb DA, Kolb AY. Eight important things to know about the experiential learning cycle. Aust Educ Leader. 2021;43[3]:8-14.